

ABSTRAK

Koperasi Simpan Pinjam Intidana diajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh para anggotanya di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang. Dalam perkara tersebut, kedua belah pihak sepakat untuk berdamai dan menandatangani Akta Perdamaian yang kemudian disahkan/ *dihomologasi* oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang. Pihak Pemohon mengajukan permohonan pembatalan perdamaian yang akhirnya dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang. Dalam tingkat kasasi, permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Penulis akan mengkaji mengenai pengaturan pergantian kepengurusan koperasi selama pelaksanaan perdamaian dalam PKPU di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, serta alasan pengajuan permohonan pembatalan putusan perdamaian (*homologasi*) Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Smg.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif. Metode ini menggunakan data sekunder terhadap asas-asas hukum serta studi kasus dengan spesifikasi penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan pergantian kepengurusan koperasi dalam masa homologasi tidak diatur dalam UU KPKPU, sehingga pergantiannya mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, yaitu melalui Rapat Anggota. Alasan diajukannya permohonan pembatalan putusan perdamaian (*homologasi*) Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Smg menurut pendirian para Pemohon adalah dilaksanakannya pergantian organ pengurus KSP Intidana yang melaksanakan PKPU, yang menyimpangi Akta Perdamaian. Hal tersebut menurut Penulis dapat dibenarkan atau tidak bertentangan dengan hukum karena dilakukan melalui rapat anggota yang sah yang juga memenuhi ketentuan Pasal 1320 Jo. Pasal 1338 KUH Perdata, serta terdapat kelalaian yang menyebabkan ketidakjelasan dan ketidakpastian pembayaran kepada anggota.

Kata Kunci : Koperasi Simpan Pinjam, PKPU, Homologasi.

ABSTRACT

The Intidana Savings and Loans Cooperative filed a request for suspension of debt payment obligations (PKPU) by its members at the Commercial Court at the Semarang District Court. In this case, both parties agreed to make peace and signed the Deed of Peace which was then ratified/homologated by the Panel of Judges of the Commercial Court at the Semarang District Court. The Petitioners submitted a request for annulment of the peace which was finally declared unacceptable by the Commercial Court at the Semarang District Court. In the cassation level, the application was rejected by the Supreme Court of the Republic of Indonesia. The author will examine the arrangements for changing the management of cooperatives during the implementation of peace in PKPU in Indonesia according to Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) and Law Number 25 of 1992 concerning Cooperatives, as well as the reasons for submitting a request for cancellation of the decision. peace (homologation) Number 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Smg.

This study uses a normative juridical approach. This method uses secondary data on legal principles as well as case studies with research specifications that are descriptive analytical.

The results of the study indicate that the regulation on the change of management of cooperatives during the homologation period is not regulated in the KPKPU Law, so that the change refers to Law Number 25 of 1992 concerning Cooperatives, namely through the Member Meeting. The reason for submitting the request for cancellation of the peace decision (homologation) Number 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Smg according to the stance of the Petitioners is the change in the organ of the KSP Intidana management that implements PKPU, which violates the Peace Deed. According to the author, this can be justified or not against the law because it is carried out through a legitimate member meeting which also fulfills the provisions of Article 1320 Jo. Article 1338 of the Civil Code, and there are omissions that cause ambiguity and uncertainty in payments to members.

Keywords: *Savings and Loan Cooperative, PKPU, Homologation.*